



TRIBUN JOGJA/MIPTAHUL, HUDA

SUARAKAN ASPIRASI - Suasana doa bersama dan audiensi PKL Maliloboro di halaman DPRD DIY, Rabu (26/1).

Pendorong Gerobak Minta Jatah Lapak

KELOMPOK pendorong gerobak di kawasan Maliloboro, Kota Yogyakarta meminta pemerintah setempat mencari pekerjaan yang layak. Apabila permintaan tersebut tak dipenuhi, sebagai gantinya para pendorong gerobak PKL di Maliloboro meminta jatah lapak. Ketua Koordinator Pendorong Gerobak Maliloboro Suwarno mengungkapkan, rata-rata para pendorong gerobak di kawasan Maliloboro bekerja sejak 20 tahun yang lalu. Dengan adanya relokasi para PKL, mereka terancam kehilangan pekerjaan, sebab jasa pendorong gerobak diprediksikan tidak akan dibutuhkan.

"Kami minta pemerintah perhatikan pendorong gerobak. Kami minta carikan

pekerjaan. Kalau tidak ya saya minta (jatah) lapak," ungkapnya, Rabu (26/1) di gedung DPRD DIY.

Alasan lain para pendorong gerobak itu meminta jatah lapak lantaran mereka menilai pedagang di kawasan Benteng Vredeburg yang dinilai oleh mereka ilegal, namun PKL di sana turut mendapatkan lapak.

Sehingga ada kecemburuan sosial yang dirasakan oleh para pendorong gerobak terkait pembagian lapak baru itu. "Sedangkan saya 20 tahun dorong gerobak kok gak diperhatikan sama sekali," sambung Suwarno.

Saat ini terdapat 85 pendorong gerobak di kawasan Maliloboro yang setiap harinya menggantungkan hidup kepada

para PKL. Dari rata-rata pendapatan per bulan dari mendorong gerobak itu diizinkan Suwarno mencapai Rp4 juta.

"Tapi kan itu dibagi-bagi, sayd ada dua anak buah, yang lainnya juga," tegas dia.

Menurutnya, pemerintah DIY maupun Pemkot Yogyakarta tidak merangkul para pendorong gerobak. Dia menilai nasib para pendorong gerobak di Maliloboro tidak dipikirkan oleh pemerintah.

Rekan sesama pendorong gerobak lainnya, Haryadi mengatakan, untuk saat ini memang jumlah lapak sudah ditentukan sesuai data para PKL. Akan tetapi, menurutnya pemerintah harus mengupayakan lapak tambahan untuk para pendorong gerobak. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005